

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk mengelola kebijakan dan pelayanan publik. Dalam lingkup pelayanan publik, birokrasi berperan sebagai institusi yang berfungsi untuk menyelenggarakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari perannya, birokrasi menjadi instrumen utama dalam memastikan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Pengimplementasian birokrasi tersebut, tidak hanya mendukung stabilitas administrasi pemerintahan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, birokrasi dirancang sebagai institusi negara yang bertugas untuk mengatur administrasi pemerintahan agar dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

Birokrasi pemerintah memegang peranan penting dalam pengelolaan kebijakan dan respons terhadap berbagai permasalahan, salah satunya adalah dalam menangani permasalahan bencana alam, yang dimana fenomena bencana alam kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hal ini, birokrasi bertanggung jawab untuk merancang, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam mitigasi, kesiapsiagaan, merespons, maupun melakukan pemulihan pasca bencana.

Indonesia merupakan negara yang termasuk kedalam kondisi geografis yang strategis dan unik, karena terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia diapit diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi silang yang berdampak pada wilayah sebagai penghubung Kawasan Pasifik dan Atlantik. Di sisi lain, hal tersebut mempunyai arti penting dalam kaitannya

dengan iklim baik dari segi cuaca, pola musim, maupun bencana alam. Keberadaan beberapa lempeng tektonik aktif, serta wilayah yang dipenuhi oleh gunung api aktif membuat Indonesia sangat berpotensi sekaligus rawan terhadap terjadinya bencana alam seperti, gempa bumi, letusan gunung berapi, serta ancaman tsunami. Selain itu, perubahan iklim dan eksploitasi lahan yang tidak terkontrol sering menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, serta kekeringan di berbagai wilayah.

Sebagai negara beriklim tropis yang mempunyai dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam yang bersifat musiman yang sering kali dipicu oleh fenomena iklim global seperti *La Nina* dan *El Nino*. Pada saat musim hujan terjadi, potensi terjadinya banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem meningkat terutama pada saat *La Nina* datang yang memperpanjang intensitas hujan. Sebaliknya, musim kemarau yang diperpanjang oleh *El Nino* sering kali membawa risiko kekeringan yang parah bahkan dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dinamika ini meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan yang mencerminkan betapa rentannya wilayah Indonesia terhadap perubahan iklim. (Yustiana et al. 2023)

Tabel 1. 1 Data Kejadian Bencana di Indonesia tahun 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian
1.	Karlathu	2.051
2.	Cuaca Ekstrem	1.261
3.	Banjir	1.255
4.	Longsor	591
5.	Kekeringan	174
6.	Gempa Bumi	33
7.	Gelombang pasang dan Abrasi	31
8.	Erupsi Gunung Api	4
Jumlah		5.400

Sumber : (BNPB 2023)

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Indonesia mengalami bencana dengan total 5.400 kejadian sepanjang tahun 2023, yang menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan 3.544 kejadian atau meningkat sebesar 52,37%. Bencana tersebut didominasi oleh jenis bencana hidrometeorologi yang mencapai 99,35% sedangkan bencana geologi hanya mencakup 0,65% dari total kejadian. Secara rinci, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi, tercatat sebanyak 2.501 kejadian. Selain itu, banjir juga merupakan ancaman besar dengan 1.261 kejadian, disusul cuaca ekstrem yang mencapai 1.255 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 591 kejadian. Kekeringan pun menjadi perhatian dengan 174 kejadian, lalu bencana geologi gempa bumi tercatat mengalami 33 kejadian dan gelombang pasang atau abrasi sebanyak 31 kejadian. Selain itu, Indonesia juga mengalami erupsi gunung berapi pada tahun 2023 sebanyak 4 kejadian. Selain dilihat dari jenisnya, bencana alam juga banyak melanda sejumlah provinsi yang ada di Indonesia pada kurun waktu 2023. (BNPB, 2023)

Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak mengalami bencana alam pada tahun 2023 berdasarkan jumlah kejadian bencana, yaitu sebanyak 884 kejadian. Diikuti Jawa Tengah yang dilanda bencana alam sebanyak 584 kejadian. Setelahnya, ada Kalimantan Selatan yang mengalami 490 kejadian bencana alam selama kurun waktu 2023. Kabupaten Bandung, sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang rentan dan rawan akan bencana, berdasarkan dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023, Kabupaten Bandung menduduki urutan ke-116 dari 454 Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan skor 132 yang menunjukkan tingkat risiko bencana tinggi. Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama di daerah pegunungan dan kawasan yang mengalami alih fungsi lahan secara massif, menjadikan wilayah tersebut menduduki peringkat ke - 4 dengan jumlah kejadian bencana berpotensi tinggi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. (BNPB, 2023).

Kabupaten Bandung merupakan sebuah wilayah dengan dataran tinggi atau berada di wilayah pegunungan, secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada

koordinat $6^{\circ}41' - 7^{\circ}19'$ Lintang Selatan dan diantara $107^{\circ}22' - 108^{\circ}50'$ Bujur Timur yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan. Kabupaten Bandung memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan tahunan rata-rata antara 1.500 mm dengan 4.000 mm. Suhu udara di wilayah ini, berkisar antara 14°C hingga 37°C dengan tingkat kelembabannya berkisar antara 75% pada musim hujan dan 60% pada musim kemarau. Selain itu, Kabupaten Bandung juga memiliki lahan kering yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Secara morfologis, Kabupaten Bandung terdiri dari wilayah yang datar, perbukitan, dan pegunungan, dengan kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% hingga 100%. Kondisi alam tersebut, membuat Kabupaten Bandung rentan akan terhadap bencana alam.

Kabupaten Bandung kini menghadapi tantangan besar dalam upaya penanggulangan bencana alam akibat peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian bencana yang terjadi selama 3 tahun terakhir, Kabupaten Bandung menghadapi lonjakan tajam dalam kejadian bencana alam dengan angka yang meningkat dari 273 kejadian pada tahun 2021, menjadi 310 kejadian pada tahun 2022, hingga melonjak tajam menjadi 904 kejadian pada tahun 2023. Lonjakan bencana ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah, khususnya BPBD Kabupaten Bandung, dalam upaya penanggulangan bencana yang semakin kompleks dan menuntut kecepatan serta ketepatan dalam setiap tindakan.

Tabel 1. 2 Data Kejadian Kabupaten Bandung Tahun 2023

NO	Jenis Bencana	Kejadian Bencana	Jiwa Terdampak
1	Banjir	61 Kejadian	62.000 orang
2	Angin Kencang	54 Kejadian	2.885 orang
3.	Longsor	130 Kejadian	933 orang
4.	Gempa Bumi	5 Kejadian	25 orang
5.	Kekeringan	392 Kejadian	741.708 Orang
6.	Karhutlah	262 Kejadian	-
7.	Lain – lain	116 Kejadian	567 Orang

Sumber: LAKIP BPBD Kabupaten Bandung 2023 (diolah peneliti, 2024)

Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan merupakan permasalahan musiman yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung. Sebagai daerah yang berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum beserta anak-anak sungainya, banjir telah menjadi persoalan tahunan yang terus berulang, khususnya saat musim hujan. Di sisi lain, pada musim kemarau, kondisi berbalik dengan munculnya masalah kekeringan akibat minimnya pasokan air. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bandung menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola fluktuasi ketersediaan air sepanjang tahun.

Dengan permasalahan terkait bencana alam di atas, maka pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari ancaman bencana dan sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban pemerintah dalam pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai inisiasi dalam penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan BNPB. Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan bencana secara lebih terstruktur dan sistematis.

Dalam praktiknya BPBD Kabupaten Bandung menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kinerja mereka. Permasalahan belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki BPBD menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dilaksanakan dengan mengukur dan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dan tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya.

Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Uraian Tahun 2023			Uraian Tahun 2022			Uraian Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulan bencana	Nilai IKD	0.56 Poin	0.56	100	0.54 Poin	0.66 Poin	122.22	0.51 Poin	0.55	107.84
	Presentase Penanganan Penanggulangan Bencana	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100
Presentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	-Nilai AKIP	72 Poin	77,60	107.77	70 Poin	75.45	107.78	74 Poin	71.65	96
	-Nilai IKM	77 Poin	83,43	108.18	76 Poin	80.04	106.72	75 Poin	81,5	108
	Presentase BMD dalam kondisi baik	80%	48.64	60.80	75%	99,9	133.2	90%	89.61	99.5

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Peneliti, dari LAKIP BPBD Kabupaten Bandung, Tahun 2023)

Berdasarkan tabel capaian kinerja BPBD Kabupaten Bandung tahun 2021-2023 menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam beberapa aspek, namun juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pada indikator nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD), terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan mencapai 122,22% dibanding target yang ditetapkan, namun stagnasi pada tahun 2023 dengan realisasi tepat 100% mengindikasikan adanya potensi kesulitan dalam mempertahankan performa. Di sisi lain, presentase penanganan bencana secara konsisten mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan kesiapan BPBD dalam merespons bencana. Meskipun demikian, kualitas dan efisiensi dari penanganan tersebut memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan dampak yang berkelanjutan.

Dari sisi pelayanan masyarakat, indikator Nilai AKIP dan IKM menunjukkan tren yang terus meningkat, seperti nilai IKM pada tahun 2023 mencapai 108,18%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPBD. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan pada indikator presentase BMD dalam kondisi baik, di mana capaian tahun 2023 hanya mencapai 60,80% dari target 80%, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan melebihi target dengan capaian 133,2%. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan barang dan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Keterbatasan ini menjadi hambatan yang mengurangi kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjaga aset dalam kondisi baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas operasional di lapangan. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan alokasi anggaran, peningkatan investasi pada infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pemeliharaan aset agar BPBD mampu menghadapi tantangan bencana alam yang terus meningkat secara lebih komprehensif, responsive, dan berkelanjutan.

Ukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dapat diukur melalui sembilan unsur utama yang saling terkait, yaitu persyaratan, yang mencakup dokumen atau informasi yang diperlukan masyarakat untuk mengakses layanan; prosedur, yang

melibatkan tahapan yang harus dilalui, seperti pelaporan, verifikasi, dan penanganan bencana; serta jangka waktu, yang merujuk pada durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan, termasuk waktu tanggap darurat dan penyaluran bantuan. Selain itu, unsur tarif menjadi relevan, meskipun umumnya layanan ini diberikan secara gratis, diikuti oleh unsur produk yang mencakup hasil layanan seperti informasi kebencanaan, bantuan logistik, dan evakuasi, yang kualitasnya sangat bergantung pada kompetensi petugas dalam hal kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Tidak kalah penting, perilaku petugas, yang meliputi sikap, keramahan, dan profesionalitas dalam melayani masyarakat, turut menentukan tingkat kepuasan, sebagaimana mekanisme pengaduan, yang memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan terkait pelayanan, serta unsur sarana dan prasarana yang meliputi ketersediaan dan kondisi fasilitas pendukung, seperti peralatan evakuasi, kendaraan operasional, dan pusat komando, yang secara keseluruhan menjadi elemen krusial dalam memastikan kualitas layanan BPBD.

Tabel 1. 4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Pegawai) BPBD Tahun 2023

NO	Kebutuhan Pegawai	Keadaan Pegawai	Jenis Pegawai		Realisasi %	Efisiensi %
			PNS	Non PNS		
1	127	82	27	55	64,65	35,44

Sumber: Diolah Peneliti, dari LAKIP BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, BPBD Kabupaten Bandung memiliki 82 pegawai, sementara jumlah pegawai yang ideal sesuai dengan analisis jabatan berdasarkan LAKIP dibutuhkan 127 pegawai untuk memenuhi standar unit kerja penanggulangan bencana. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung menjadi semakin krusial mengingat peningkatan kasus bencana yang terjadi pada tahun 2023. Dengan kondisi seperti ini, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memadai menjadi sangat mendesak,

mengingat semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab BPBD dalam merespons bencana yang terus meningkat. Dengan adanya keterbatasan pegawai tersebut, mempengaruhi kinerja dalam penanggulangan bencana, kekurangan pegawai ini berdampak pada kapasitas operasional BPBD dalam merespon bencana secara cepat dan efisien, karena terbatasnya sumber daya manusia yang dapat menangani berbagai tugas lapangan, mulai dari koordinasi, evakuasi hingga pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana yang terjadi pada tahun 2023, kinerja birokrasi BPBD Kabupaten Bandung sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan agar penambahan jumlah SDM dan memperbaiki efektivitas operasional dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana di masa depan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menganalisis kinerja birokrasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bandung dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan dalam merespons bencana alam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena permasalahan secara jelas mencerminkan kebutuhan untuk reformasi yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi bencana. Pemahaman akan dimensi-dimensi reformasi kinerja birokrasi menurut (Dwiyanto 2006 : 50), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, menjadi penting dalam konteks ini karena membantu mengevaluasi secara komprehensif kinerja BPBD Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam. Responsivitas menilai sejauh mana BPBD mampu merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat saat terjadi bencana, responsibilitas mengukur kesesuaian tindakan BPBD dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sementara akuntabilitas menilai transparansi dan pertanggungjawaban BPBD terhadap masyarakat, khususnya dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan program penanggulangan.

Dengan menggabungkan teori kinerja birokrasi menurut (Dwiyanto, 2006) dalam penelitian, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Birokrasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti selama di lapangan yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, maka peneliti mengidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Angka kejadian bencana alam di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan standar kebutuhan satuan unit kerja. Kualitas dan kuantitas SDM di BPBD Kabupaten Bandung belum memenuhi standar yang diperlukan untuk menangani kompleksitas dan frekuensi bencana yang semakin meningkat.
3. Keterbatasan sumber daya fisik seperti peralatan penunjang kebencanaan. BPBD Kabupaten Bandung menghadapi kendala dalam hal ketersediaan sumber daya fisik yang mencukupi untuk mendukung operasional penanggulangan bencana.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam?
2. Bagaimana kualitas Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam?
3. Bagaimana responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam?
4. Bagaimana tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam?

5. Bagaimana akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi bencana alam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis produktivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis responsivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam
4. Untuk mengetahui dan menganalisis responsibilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam
5. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan dalam rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep dalam ilmu administrasi publik, khususnya terkait kinerja birokrasi publik dalam konteks penanggulangan bencana. Penelitian ini juga dapat memperkaya referensi tentang bagaimana BPBD menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan peralatan penanggulangan bencana serta meningkatnya intensitas bencana alam, sehingga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam isu yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BPBD Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mengatasi hambatan operasional dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola bencana, mulai dari alokasi anggaran hingga penguatan infrastruktur, sehingga respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan berkelanjutan.

F. Kerangka Berpikir

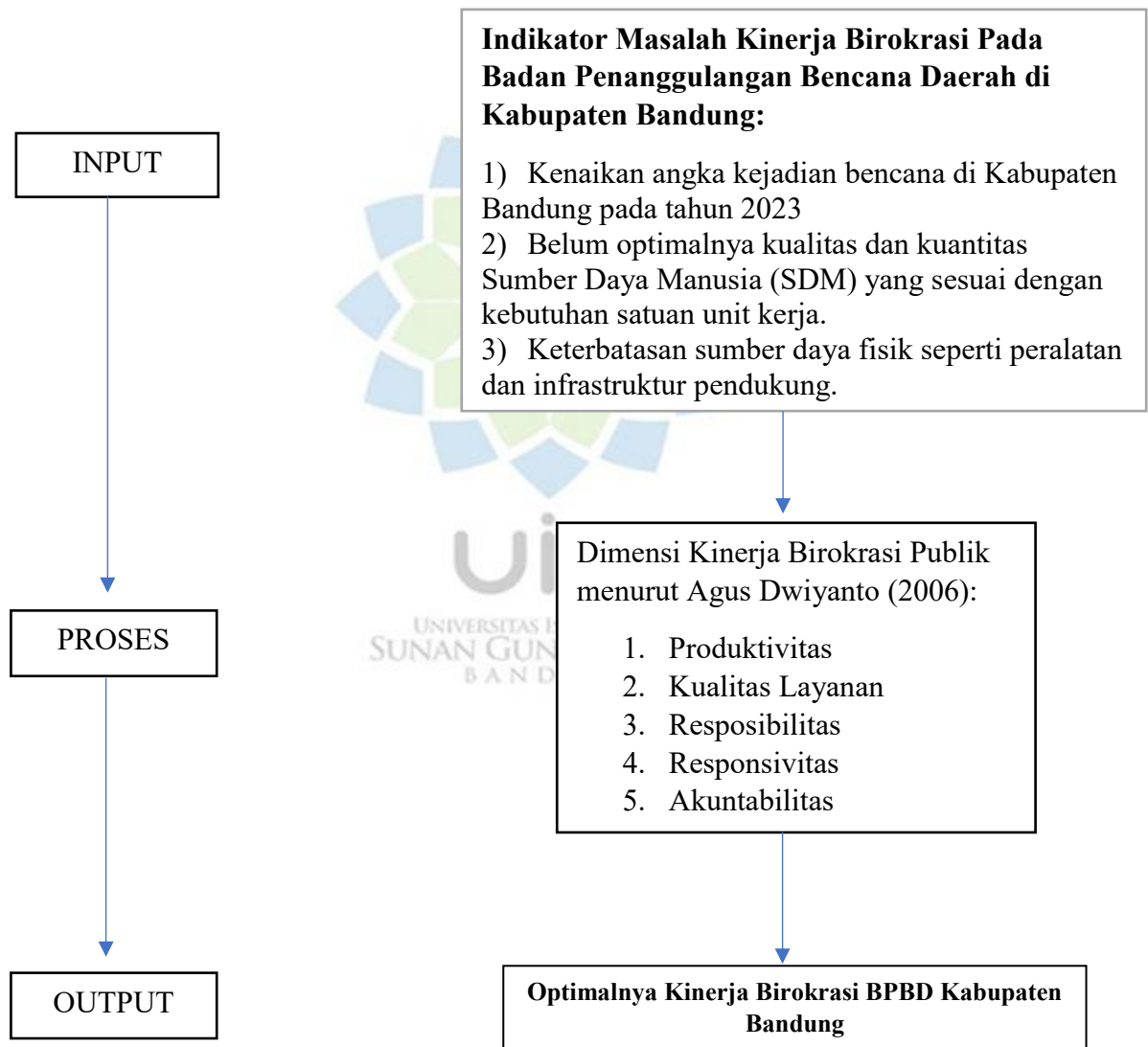
Kerangka pemikiran menurut (Sugiyono, 2013), merupakan rangkaian gagasan atau alur penelitian yang berfungsi sebagai landasan atau seperangkat aturan untuk menyelidiki objek penelitian. Dengan kata lain, kerangka berfikir berperan sebagai panduan atau dasar pemikiran peneliti ketika melakukan penelitian terhadap objek sasaran agar dapat membantu dalam menyelesaikan rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Bandung. Kinerja birokrasi publik dapat dianalisis menggunakan teori kinerja birokrasi publik menurut (Dwiyanto, 2006), yang mengidentifikasi lima dimensi kinerja sebagai berikut:

1. Produktivitas, indikator yang mengukur kinerja berdasarkan seberapa efisien dan efektif kinerja pelayanan publik
2. Kualitas layanan, kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di dalam birokrasi.
3. Responsivitas, merupakan indikator yang menilai kinerja dengan mengevaluasi kapasitas birokrasi dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan publik.

4. **Responsibilitas**, menunjukan bagaimana pelaksanaan kinerja birokrasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan birokrasi yang telah ditetapkan.
5. **Akuntabilitas**, indikator ini mengukur tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan kinerja yang ditetapkan oleh otoritas politik yang dipilih oleh publik.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti, 2024)